

KEMERDEKAAN PERS DARI MASA KE MASA, TANGGUNG JAWABNYA DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS*

Erman Rajagukguk

Perjuangannya untuk mengemukakan pendapat secara bebas dalam bentuk media cetak paling tidak sudah dimulai di Inggris tahun 1579 ketika John Stubbe sebagai penulis dan Hugh Singleton sebagai pencetak mengedarkan pamflet menanyakan tentang benar tidaknya desas desus perkawinan Ratu Elizabeth I dengan seorang bangsawan Perancis.

Stubbe tetap setia kepada Ratu, tetapi ia bertanya tentang logika apa bersatunya dua pemimpin dari dua bangsa yang selalu berperang itu. Ratu menjadi marah karena orang biasa berani mengomentari soal pemerintahan secara terbuka. Divine Right, bukanlah ia serta menteri-menterinya mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan dan bukan dari rakyat.

Keduanya masuk penjara atas tuduhan melakukan pemberontakan dan kemudian dijatuhi hukuman kehilangan tangan kanan. Stubbe kemudian menghormat pada ratu dengan tangan kiri, sedangkan belakangan hukuman untuk Singleton dibatalkan.

Pada tahun 1584 William Carter dihukum gantung karena mencetak pamflet yang pro Katolik di negeri yang diperintah oleh Protestan. Antara tahun 1644 sampai 1693 John Twyn, William Walwyn dan Anderton menjalani pula hukum gantung, karena menolak menyebut nama pengarang dari buku-buku yang mereka terbitkan. Sampai tahun 1695 Inggris memperlakukan sensor terhadap semua tulisan sebelum dicetak dan diedarkan kepada umum.

Dalam perkembangannya kemudian di banyak negara kemerdekaan pers lahir dalam berbagai variasi, dari yang ekstrim sampai dengan yang moderat.

Pers bebas mulai mendapat tempat yang penting di Amerika ketika para pencetus kemerdekaan negeri tersebut merumuskan hak hak rakyat dalam Konstitusi tahun 1787. Perdebatan sengit terjadi antara Alexander Hamilton dan Thomas Jefferson.

Berbeda dengan Alexander Hamilton, Thomas Jefferson mengatakan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat tidak cukup disebut secara umum dalam konstitusi. Ia harus diikuti oleh jaminan hukum secara tertulis untuk menghormati dan melindunginya sepanjang masa. Dari perbedaan ini lahirlah Amendemen Pertama Konstitusi Amerika yang berbunyi, antara lain: “kongres tidak dapat membuat undang undang yang membatasi kebebasan mengemukakan pendapat atau kebebasan pers...”.

* Sinar Harapan, 24 Agustus 1982.

Namun demikian sampai saat ini, 200 tahun sejak Amandemen. Pertama tersebut dicetuskan kebebasan pers di AS tetap merupakan soal yang tak kunjung selesai. Pers yang semula hanya berjumlah 35 koran mini, sekarang telah berkembang menjadi 17.500 harian dan mingguan, beberapa di antaranya beredar dalam jumlah jutaan lembar. Media cetak yang demikian luas terasa sedikit demi sedikit mulai dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja, sehingga melahirkan ketakutan pada sementara peninjau, bahwa obyektivitas sesuatu - yang amat penting dalam pers - mulai mengalami erosi.

PERS DAN MASYARAKAT

Kebebasan pers selalu dihubungkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, suatu bagian hak manusia yang paling asasi. Persoalan selalu timbul tentang “kebebasan” yang bagaimana dan sejauh mana? Penafsiran yang ekstrim oleh William O. Douglas, ia cenderung memandang bahwa kemerdekaan pers adalah absolut atau tanpa batas.

Di pihak lain banyak pandangan mengemukakan, bahwa kemerdekaan pers dibatasi oleh fungsi sosial. Dalam pengertian yang terakhir ini kebebasan pers, misalnya, tentu tidak akan melindungi hak mass media yang mengeksploitir sex, menggunakan bahasa yang tidak senonoh atau memuat berita-berita sensasi.

Kebebasan pers acapkali juga dihubungkan dengan hak masyarakat untuk mengetahui. Akan tetapi, menurut pandangan yang moderat, tanggung jawab pers bebas selalu menuntut pertimbangan hak masyarakat untuk mengetahui apa? sejauh mana? Apakah masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui nama seorang korban pemerkosaan, nama seorang terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan atau apakah umum mempunyai hak untuk mengetahui kehidupan pribadi tetangganya?

Persoalan lainnya yang sampai sekarang tetap hangat dan tak kunjung selesai adalah hubungan antara pers dan pemerintah.

PERS DAN PEMERINTAH

Hubungan antara pers dan pemerintah oleh Fred S. Siebert, Theodore B. Peterson dan Wilbur Schramm dibagi dalam tiga periode. Periode pertama yaitu apa yang disebut dengan konsep otoritarian yang berkembang sejak abad ke 14, dimana negara di atas segala galanya dan individu hanya menjadi penting dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan negara. Kebenaran dibatasi dan menjadi monopoli dari pemerintah. Sesuatu yang telah mendapat persetujuan dari negara menjadi standar untuk setiap orang.

Pemimpin pemimpin otorokrasi pada mulanya mengakui bahwa pers berguna untuk mereka jika dapat dikontrol, tetapi menjadi berbahaya jika dibiarkan berkembang secara bebas. Kontrol terhadap pers dilakukan melalui berbagai macam perizinan, sensor dan penghukuman. Konsep ini berkembang di Amerika dan Eropa Barat sampai pertengahan abad 18.

Sebagai tantangan terhadap otoritarianis, lahirlah konsep pers libertarian. Konsep ini menganut paham bahwa rakyat adalah di atas segala-galanya. Mereka mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah dan dapat menyuruh pemerintah bersangkutandun pada saat mana rakyat memandangnya perlu untuk mundur. Untuk ini pers harus bebas mengemukakan ideanya dalam semua soal dan berfungsi sebagai pengontrol pemerintah. Dalam prakteknya pers, berada ditangan swasta dan mendapat pembiayaan dari partai.

Berlainan dengan penganut penganut libertarianism, pendiri Soviet menganggap bahwa pers adalah alat pemerintah. Surat kabar dan mass media lainnya adalah milik pemerintah dan partai Komunis yang menjalankan pemerintahan. “Buat apa diizinkan kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers? Mengapa pemerintah yang menganggap apa yang dikerjakannya benar harus dikritik? Tak perlu oposisi oleh senjata maut”, kata Lenin. Menurut Lenin, idea lebih berbahaya dari senjata api.

Belajar dari kelemahan kelemahan libertarianism dan berkembangnya mass media pada abad kedua puluh ini, di mana terjadi konsolidasi mass media dan berubahnya konsep pemilikan surat kabar, maka apa yang dianggap *obyektive reporting* dalam libertarian era sekarang dapat dianggap tidak bertanggung jawab. Pemberitaan mass media haruslah dihubungkan dengan latar belakang dari sesuatu yang terjadi dan menempatkannya dalam hubungannya dengan masa depan. Fred S. Siebert, Theodore B. Peterson dan Wilbur Schramm menyebutnya sebagai tanggung jawab sosial dari pers bebas.

TANGGUNG JAWAB

Inti dari pada demokrasi adalah kepercayaan bahwa akal, kebijaksanaan dan karakter dari sebagian besar masyarakat akan membawa kepada keadaan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Akan tetapi masyarakat dalam alam demokrasi hanya dapat berfungsi jika kepadanya diberikan fakta fakta yang betul mengenai lingkungan di mana dia hidup. Jika rakyat tidak mendapat informasi yang benar mengenai persoalan persoalan mereka, maka mayoritas dari mereka yang memerintah tidak saja tidak dapat mengambil keputusan, bahkan akan membuat keputusan yang salah.

Kemampuan pers dalam menjalankan peranannya tersebut banyak bergantung kepada seberapa jauh kemerdekaan diperolehnya dari pemerintah dan kekuatan-kekuatan lain. Hanya pers yang bebas yang dapat melayani masyarakat yang demokratis. Ia harus bebas mengkritik dengan bijaksana dan benar tingkah laku para pejabat dan ia harus mempunyai hak untuk mengetahui aktivitas pemerintahan.

Namun demikian kebebasannya harus diiringi tanggung jawab, yang sama pentingnya dengan kebebasan itu sendiri. Menurut Ernest C. Hynds pertama-tama, pers harus mengemukakan kebenaran. Ia tidak cukup memuat tentang *body contest*, mengutip pendapat seorang terkemuka tentang sesuatu kontroversi atau mengutip secara lengkap pesan seorang eksekutif, pers harus menguraikan arti dari pada informasi yang ia berikan dan menempatkannya dalam hubungan masa depan yang lebih baik.

Kedua, pers dalam masyarakat demokratis mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sistem demokrasi itu sendiri. Ia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada legislator, pejabat-pejabat dan warga negara pada umumnya. Sebaliknya ia mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas pemerintahan dalam setiap tingkatan. Pers mampu menjadikan dirinya sebagai forum pertukaran pandangan dan kritik.

Ketiga, pers harus mampu menolong individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memperbaiki diri.

Keempat, pers harus mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ia harus memberitakan sesuatu secara tepat, benar, fair dan terhormat. Pada akhirnya pers yang bebas harus mampu berdiri sendiri, lepas dari hambatan-hambatan pemerintah atau kekuatan dari struktur ekonomi dimana dia menjadi salah satu bagian.

Kebebasan pers harus dijaga dari penerbit yang hanya ber-tujuan untuk mencari uang. Tujuan pers bebas dengan tanpa disadari dapat dibatasi oleh, misalnya, kebutuhan akan iklan. Di samping itu pers bebas yang menumbuhkan penerbitan-penerbitan luas dan besar jangan mematikan pers-pers lokal yang mempunyai perhatian lebih besar terhadap masalah-masalah di lingkungan mereka.

Dilemma

Berkembangnya mass media haruslah diiringi dengan kesadaran tentang peranan mereka dalam masyarakat. Konsep ini melahirkan serangkaian peraturan, di mana pers harus subyektif dan menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan dan rahasia pribadi serta melindungi kepentingan tertinggi dari negara. Pers mengakui kewajiban-kewajiban ini, tetapi persoalan

selalu timbul tentang bagaimana penafsiran dari rumusan tanggung jawab tersebut? Siapa yang menentukan dan siapa pula yang berhak menetapkan kapan pers telah mengingkarinya?

Dalam tradisi demokrasi kemerdekaan pers memerlukan sedikit mungkin peraturan dan mendapat kepastian hukum melalui suatu pengadilan yang bebas.

Di banyak negara berkembang pers seperti berjalan di tepi mata pisau, di bawah serangkaian pembatasan dan tekanan. Jika pers hendak memberikan sumbangannya kepada kemajuan nasional, maka baik pers maupun pemerintah hendaknya mengembangkan hubungan saling mempercayai dari pada hubungan yang antagonistis yang penuh dengan kecurigaan. Ini tidak berarti pers tidak dapat mengeritik kebijaksanaan pemerintah, namun pers dihadapkan kepada sejauh mana ia dapat mengungkapkan kritik-kritik di bawah kondisi sosial politik di mana ia berada. Dalam ketiadaan ketentuan, maka pers memutuskan sendiri apa yang ia anggap bijaksana. Ia harus kembali kepada keterikatannya kepada bangsa, masyarakat dan profesinya. Kadang-kadang kebijaksanaan itu dipandang keliru oleh pihak lain, maka kebebasan mundur menghadapi pembatasan-pembatasan, tanpa dapat dibuktikan secara resmi. Namun kadang-kadang terjadi juga pers yang terkontrol tiba-tiba mendapatkan kebebasannya.